

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu:

1. Terkait dengan kewenangan penghitungan kerugian Negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi. KPK, Kejaksaan dan Polri harus berdasarkan hasil audit BPK, walaupun BPKP maupun akuntan publik lainnya yang memiliki kemampuan untuk menghitung kerugian negara. tapi harus meminta pengesahan dari BPK agar tidak ada kesalahpahaman dalam hasil audit tersebut, mengingat bahwa BPK merupakan lembaga yang diamanatkan dalam konstitusi.
2. Kendala yang dihadapi oleh BPK RI baik secara pelaksanaan maupun secara konstitusional, yaitu:Adanya perbedaan pandangan tentang kewenangan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk pembuktian tindak Pidana korupsi. Minimnya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari instansi yang berwenang. BPK dalam melaksanakan tugas secara konstitusional juga mendapat kendala, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu waktu pemeriksaan yang terbatas,

Keterbatasan sumber daya pemeriksa, Keterbatasan anggaran. Sedangkan secara external melakukan kordinasi dengan lembaga hukum.

3. Upaya yang dilakukan BPK RI untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu. BPK lebih meningkatkan komunikasi dengan lembaga hukum, BPK RI harus meningkatkan jumlah pemeriksa atau menambah personil *auditor*. selain menambah jumlah *auditor* BPK juga harus menyiapkan kualitas *auditor*, yaitu: kompetensi dari auditor, metodologi pemeriksa, pemeriksaan berbasis resiko dan melakukan perencanaan anggaran yang terencana.

Untuk mencapai hasil pemeriksaan yang efektif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan. Badan Pemeriksa Keuangan harus mengumpulkan informasi yang seluas-luasnya dari bentuk hasil partisipasi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Kewenangan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23E dan juga di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh BPK dalam melaksanakan kewenangannya, maka dapat diberi saran sebagai berikut.

Kendala yang dihadapi BPK dalam pelaksanaan yaitu:

- a. Terkait dengan perbedaan persepsi tentang kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. KPK dan lembaga hukum lain, boleh memintah lembaga auditor lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan audite tetapi harus berpatokan pada standar pemeriksaan keuangan agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan BPK.
- b. Dengan minimnya tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Lebih meningkatkan komunikasi dengan lembaga hukum agar proses tindak lanjut yang dari hasil pemeriksaan yang indikasi kerugian negara dapat diproses dengan cepat, tanpa ada yang tunggu dan di tahan.
- c. Waktu pemeriksaan BPK sempit, maka harus ada revisi undang-undang yang terkait dengan waktu pemeriksaan. Karena waktu yang ditentukan dalam undang-undang sangat sempit dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK begitu banyak.
- d. BPK dapat melakukan perekrutan tenaga *auditor* atau dapat memakai tenaga ahli dari luar untuk menunjang tugas-tugas dan kewenangan BPK agar mencapai hasil yang efektif.
- e. Menyangkut dengan keterbatasan anggaran, BPK harus mengoptimalkan anggaran yang tersedia, agar tidak menjadi kendala dalam meklasanakan tugas dan kewenangan.

## Daftar Pustaka

### Buku.

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Nasution, 2009, *Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi*, Makalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Manado,
- Bakti M.D.J.AL Bary, 1996, *Kamus Peristilahaan Moderen dan Populer 10.000 Istilah*, Surabaya, Indah Surabaya.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimli Asshiddiqie, 2000, *Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Jimli Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konstitusi Pers*, Jakarta,
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jakarta.
- Muhamat Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Otje Salman, 2007, *Teori, Tori Hukum-Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum – Perkembangan Dandinamika Masalah*, Refika Aditama Bandung.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2000, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, yogyakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Riawan Tjandra W, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.

R, Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Pradnya Paramita.

Sartjipto Rahardjo, 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakraturan (Teaching Order Finding Disorder),” Tigah Puluh Tahun Perjalanan Perjalanan Intelektual Dari Bojong Ke Peleburan* “, Pidato Emeritus Guruh Besar, Undip, 15 Desember 2000.

Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa keuangan*, Jakarta.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administasi Negara dan Upaya Adminstrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikmo Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGarfindo Persada, Jakarta.

Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakrta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 23 (E).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangang Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654.

**Inernet,**

Kamus Besar , <http://kbbi.web.id/kuat>, diunduh pada tanggal 23 April, 2016.

[http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/Kewenangan-](http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/Kewenangan-Penghitungan-Kerugian-Negara)

[Penghitungan-Kerugian-Negara](http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/Kewenangan-Penghitungan-Kerugian-Negara). diunduh 14 Mei 2016.